

Telaah Kualitatif Model Penerapan, Pelaporan dan Pemeriksaan *Green Accounting* pada Perusahaan

Zalida Afni¹, Reno Fithri Meuthia², Zahara³, Rezkia Rahmayani⁴

Jurusan akuntansi, Politeknik Negeri Padang¹²³⁴

Kampus Politeknik Negeri Padang Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang 25164, Indonesia

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah model penerapan, pelaporan dan pemeriksaan *green accounting* pada unit PT PLN (Persero) yaitu UPK Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan empat tahapan progresif yaitu *environmental awarness*, *environmental involvement*, *environmental reporting*, dan *environmental auditing* sesuai tahapan pada penelitian Teoh and Thong (1984). Penelitian ini juga mendeskripsikan kebijakan Perseroan Terbatas mampu mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi memiliki kesadaran untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaannya dikenal dengan istilah CSR. Kebijakan yang mengatur Perseroan Terbatas mampu mendorong keterlibatan PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi terhadap tanggung jawab sosial. Aktivitas PLTA yang dinaungi oleh PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi dan kegiatan CSR yang dilakukan dianggap telah turut andil dalam kebijakan industri ramah lingkungan.

Kata kunci. *Green Accounting*, Environmental, CSR

Abstract. This research aims to study the implementation model, reporting and inspection of green accounting in PT PLN (Persero) unit, UPK Bukittinggi. The research uses four progressive stages, namely environmental awarness, environmental involvement, environmental reporting, and environmental auditing according to the stages of research in Teoh and Thong (1984). The research also describes the policy of limited liability company to encourage companies to carry out social responsibility and corporate environment. This research is a qualitatively descriptive study with case study methods. Data is obtained by interview techniques and documentation. The results of this research show that PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi has awareness to carry out social and environmental responsibility. Implementation of social responsibility and the environment of his company is known as CSR. The policy governing the limited liability company is able to encourage the involvement of PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi against social responsibility. The activities of PLTA shaded by PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi and CSR activities are deemed to have contributed to the policy of environmentally friendly industries.

Keywords. *Green Accounting*, Environmental, CSR

Corresponding Author. Zalida.afni@yahoo.com, enofm87@gmail.com, zahara.ak@gmail.com, rezkiahtp@gmail.com

How to Cite This Article. Zalida Afni, Reno Fithri Meuthia, Zahara, Rezkia Rahmayani. (2019). Telaah Kualitatif Model Penerapan, Pelaporan dan Pemeriksaan *Green Accounting* pada Perusahaan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11 (2), 340-349.

History of Article. Received : Desember 2019, Revision: Desember 2019, Published: Desember 2019

Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : 10.17509/jaset.v11i2.20794

Copyright©2019. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Sejak didengungkan istilah *global warming*, setiap negara berusaha untuk mengurangi berbagai ancaman yang

ditimbulkan oleh masalah-masalah lingkungan hidup. Krisis ekologi global maupun nasional yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat eksploitasi

sumber daya alam dan lingkungan secara serakah semakin parah dan mengkhawatirkan. Krisis tersebut telah menimbulkan berbagai bencana lingkungan yang sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi salah satu aspek pendorong munculnya akuntansi hijau (*green accounting*).

Green accounting adalah proses akuntansi yang mengintegrasikan pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan, sosial dan lingkungan secara terpadu dalam satu paket pelaporan akuntansi, yang berguna bagi para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan non ekonomi.

Laporan akuntansi tidak hanya menyajikan informasi keuangan tetapi juga informasi sosial dan lingkungan secara terintegrasi. Tujuan dari *green accounting* adalah berusaha untuk mengurangi efek negatif dari kegiatan ekonomi dan sistem pada lingkungan hidup. Di Indonesia, akuntansi lingkungan mengalami kesulitan dalam pengukuran nilai *cost and benefit* yang muncul dari proses industri.

Pelaporan mengenai kinerja sosial maupun kinerja lingkungan tidak terdapat dalam laporan keuangan konvensional secara terperinci, dalam laporan keuangan konvensional hanya kinerja ekonomi saja yang dengan mudah dijumpai (Idris, 2012). Dewi (2016) meneliti *green accounting* di kalangan UMKM, kendala yang dihadapi UMKM karena belum ada kebijakan tegas untuk UMKM, tetapi untuk Perseroan Terbatas kebijakan ini sudah mengatur secara rinci.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan telaah kualitatif tentang penerapan, pelaporan, dan pemeriksaan aktivitas terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apakah keberadaan kebijakan-kebijakan terkait *green accounting* di Indonesia dapat mendorong penerapan *green accounting* pada PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi sebagai salah satu

perusahaan BUMN, serta ingin melihat sejauh mana PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi turut andil dalam kebijakan industri ramah lingkungan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan pada perkembangan studi *green accounting* di Indonesia. Bagi PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih sebagai bahan masukan bagi manajemen dalam operasional perusahaan untuk melaksanakan *green accounting* dan menjadikan perusahaan sebagai industri ramah lingkungan. Untuk kontribusi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat membantu Kementerian BUMN sebagai regulator perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Indonesia dalam merumuskan kebijakan terkait *green accounting* dan mengawasi jalannya operasional.

LANDASAN TEORI

Secara konseptual Andreas Lako (2018) mendefenisikan Akuntansi hijau sebagai berikut suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi berkenaan dengan transaksi, peristiwa, dan suatu objek keuangan, sosial, dan lingkungan secara terpadu dalam proses akuntansi agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terpadu, utuh, dan relevan yang berguna bagi pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi.

Aktivitas *green accounting* juga dijelaskan oleh Colen dan Robbins (2011:190) yaitu akuntansi lingkungan mengumpulkan, menganalisis, menilai, dan menyiapkan laporan data lingkungan dan keuangan dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan dan biaya. Bentuk akuntansi ini juga penting bagi banyak aspek kebijakan pemerintah, sehingga akuntansi lingkungan telah menjadi aspek kunci dari bisnis hijau dan pengembangan ekonomi yang bertanggung jawab.

Tahapan penerapan *Green Accounting* didasarkan pada penelitian Teoh dan Thong (1984). Terdapat empat level progresif dalam hal tanggung jawab lingkungan hidup suatu

perusahaan, yakni; perhatiannya terhadap permasalahan lingkungan (*environmental awareness*), keterlibatannya dalam permasalahan lingkungan (*environmental involvement*), pelaporan permasalahan lingkungan (*environmental reporting*) dan audit lingkungan (*environmental audit*). Beberapa teori yang mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan adalah *legitimacy theory* dan *stakeholder theory* (Deegan, 2004: 292).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi *green accounting* pada perusahaan, serta memungkinkan penulis dapat melihat praktik serta memahami dan mendeskripsikan bagaimana persepsi entitas terhadap kesadaran, keterlibatan, pelaporan, dan pemeriksaan *green accounting*. Selain itu, penelitian kualitatif juga memberi peluang untuk dapat mendeskripsikan secara langsung bagaimana praktik *green accounting* yang sudah diterapkan selama ini.

Penelitian ini menggunakan desain *case study* (studi kasus). Dalam dunia bisnis, studi kasus menggunakan bukti empiris dari satu atau lebih organisasi sebagai usaha yang dilakukan untuk mempelajari dalam konteks pembelajaran, menggunakan beberapa sumber bukti, meskipun sebagian besar bukti-bukti tersebut berasal dari wawancara dan dokumen.

Penulis memilih PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai kasus dalam penelitian ini karena PT PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan operasionalnya berhubungan langsung dengan sumber daya alam, dari mulai pembangkitan, pendistribusian, produk, dan layanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT PLN (Persero). BUMN memiliki kementerian sendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan semua dasar hukum yang ada untuk menerapkan *green accounting*,

perusahaan-perusahaan BUMN lebih diperketat oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sehingga diharapkan penerapan *green accounting* dapat berjalan sebaik mungkin di PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi.

Untuk memfokuskan hasil penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui penerapan *green accounting* di PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi yang dilihat berdasarkan tahapan progresif yang dibahas Teoh dan Thong (1984). Dengan adanya peraturan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas apakah mempengaruhi penerapan *green accounting* pada PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer, penulis melakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan data seperti wawancara mendalam dengan manajemen, baik dalam penerapan, pelaporan, atau pemeriksaan.

Penulis mewawancarai beberapa pihak yang mengerti akan permasalahan penelitian dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan pada PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi, yaitu Tim CSR. Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan wawancara semi terstruktur agar responden dapat menyampaikan pendapat dan ide-idenya terkait pertanyaan yang diajukan serta memungkinkan untuk dilakukan *open-ended question* ketika ada beberapa poin baru yang muncul dari jawaban wawancara. Semua kegiatan wawancara penulis rekam guna penulis transkrip untuk mendapat bukti konkret.

Untuk data sekunder, penulis dapatkan dari review dokumen terkait implementasi dan pelaporan *green accounting* serta beberapa dokumen lainnya. Penulis juga menggali informasi-informasi dengan studi pustaka dari buku, artikel, dan website PT PLN (Persero) terkait *green accounting*. Form penilaian kelayakan program dan Laporan Realisasi CSR PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi

untuk tahun 2018 menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

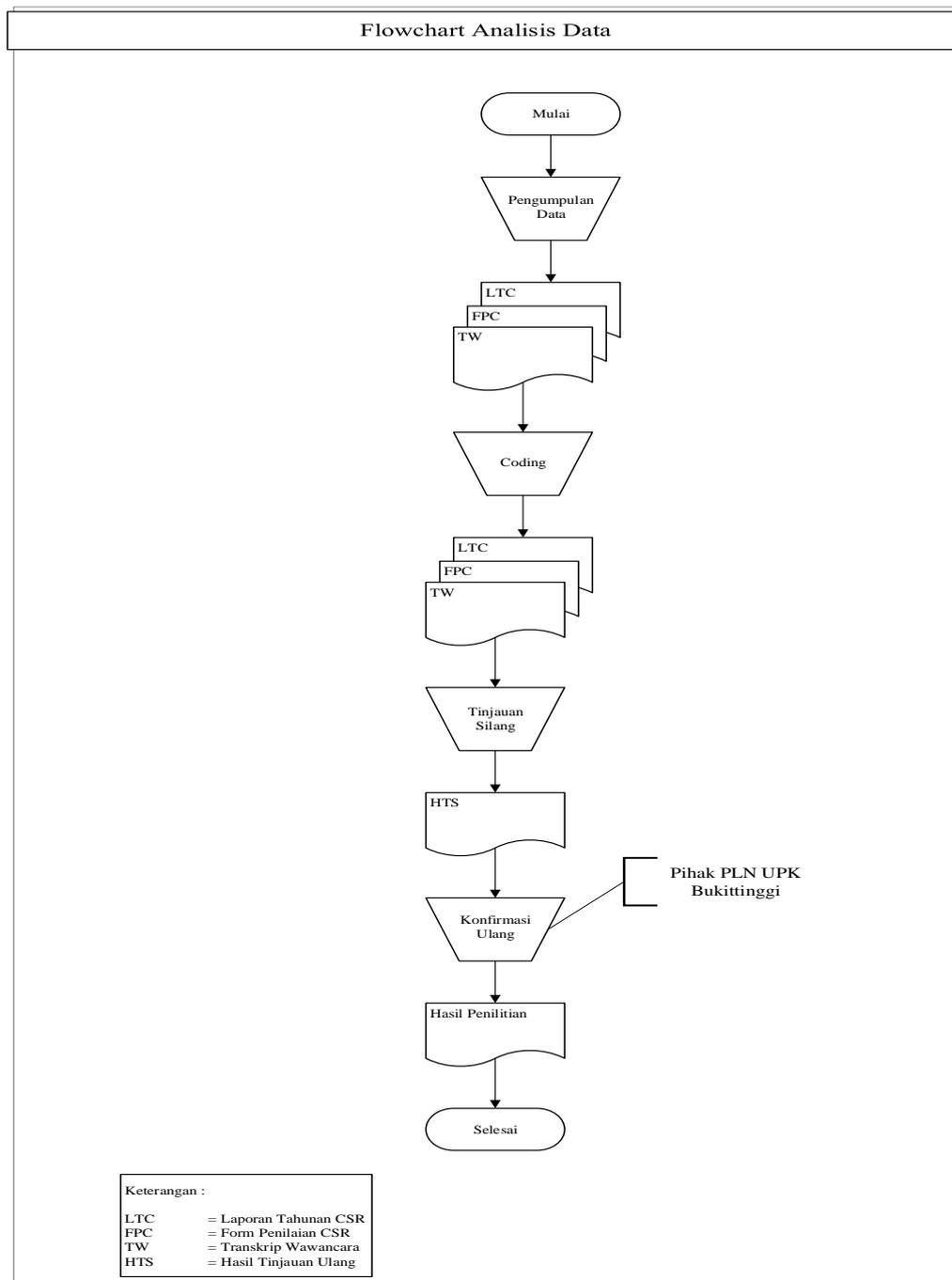
Analisis tematik adalah metode yang akan penulis lakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini. Analisis tematik merupakan cara mengidentifikasi tema-tema yang terpola dalam suatu fenomena. Proses mengkode informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema, atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal di antara atau gabungan dari yang telah disebutkan. Tema-tema tersebut memungkinkan interpretasi fenomena. Suatu tema dapat diidentifikasi pada tingkat termanifestasi (*manifest level*), yakni yang secara langsung dapat terlihat. Suatu tema juga dapat ditemukan pada tingkat laten (*latent level*), tidak secara eksplisit terlihat tetapi mendasari atau membayangi (*underlying the phenomena*) (Poerwandari, 2005).

Menurut Hayes (dalam Indrayanti dkk, 2008) proses analisis tematik yaitu, informasi diurutkan berdasarkan nomor tema. Tema dalam hal ini mengacu pada ide-ide dan topik-

topik yang diperoleh dalam analisis material dan menghasilkan lebih dari satu kelompok data. Tema yang sama digambarkan oleh kata yang berbeda, terdapat dalam konteks berbeda, atau diekspresikan oleh orang yang berbeda.

Tahapan-tahapan pelaksanaan analisis tematik dari Hayes (dalam Indrayanti dkk, 2008) adalah sebagai berikut: (1) Menyiapkan data yang akan dianalisis dengan cara dikelompokkan; (2) Mengidentifikasi item-item tertentu yang relevan dengan topik studi; (3) Mengurutkan data berdasarkan kesamaan tema; (4) Menguji kesamaan tema dan menformulasikan dalam sebuah kategori tertentu; (5) Memperhatikan masing-masing tema secara terpisah dan hati-hati untuk menguji kembali masing-masing transkrip jawaban yang memiliki tema yang sama.

Menggunakan semua material yang berhubungan dengan masing-masing tema untuk membuat tema akhir yang berisi sebuah nama kategori dan pengertiannya bersama dengan data pendukung, dan menyeleksi data yang relevan untuk dibuat menjadi ilustrasi dan melaporkan masing-masing tema.

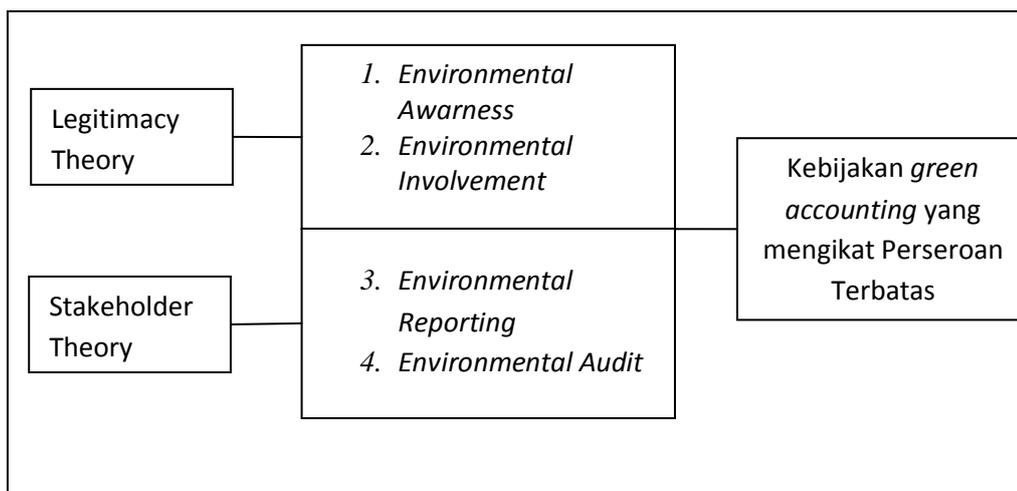


Gambar 1. Flowchart Analisis Data

Dibuat oleh Rezkia Rahmayani, dengan penjelasan menurut Hayes dalam Indrayanti dkk, 2008)

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana penerapan *green accounting* pada salah satu perusahaan BUMN yang kegiatan operasionalnya sangat

lekat dengan lingkungan hidup. Pertama, penulis akan melihat bagaimana penerapan *green accounting* berdasarkan tahapan progresif yang dibahas Teoh dan Thong (1984), yakni *environmental awarness, environmental involvement, environmental reporting, environmental audit.*



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Kemudian, penelitian ini akan melihat apakah kebijakan-kebijakan yang mengikat Perseroan Terbatas mendorong PT PLN (Persero) menerapkan *green accounting*. Apabila kebijakan-kebijakan terkait *green accounting* di Indonesia mampu mendorong pertanggungjawaban lingkungan pada PT PLN (Persero), maka penulis akan melihat sejauh mana peran PT PLN (Persero) selaku perusahaan BUMN turut andil dalam industri ramah lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menunjukkan model regresi ini tepat *Environmental Awareness* PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi

PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi sangat menyadari pentingnya kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan CSR diharapkan memberikan efek timbal balik antara PLN dengan masyarakat. PLN mendapat dukungan penuh dari masyarakat, dan masyarakat dapat merasakan kehadiran kepedulian PLN di tengah masyarakat.

“Terkait dengan PLN terhadap lingkungannya, PLN sangat peduli dengan lingkungan, bahkan sadar dengan adanya PLN disetiap kawasan masing-masing, karena PLN itu pelayan masyarakat, jadi masyarakat jangan semena-mena terhadap PLN, (...) jadi

dengan adanya CSR itu lahirnya kebaikan antara kedua belah pihak. kita membantu itu kita upayakan bagaimana umpan balik dari masyarakatnya...” (Bapak Koji, 3 September 2019)

Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2004).

PLN menyadari sebagai perusahaan dengan kapitalisasi pasar listrik satu-satunya di Indonesia yang berada di sekitar masyarakat, PLN ingin banyak membantu bukan hanya produk PLN yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, tetapi kehadiran CSR PLN juga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar.

“Sebenarnya itu bentuk partisipasi perusahaan ya karena perusahaan besar yang ada di suatu tempat jadi perusahaan ini ingin mensejahterakan juga masyarakat disekitar yang berdampak langsung sama perusahaan itu. Kan intinya dia sosial jadi membantulah. (...) Dengan adanya perusahaan disana adanya program berkesinambungan pemberdayaan mereka bisa nambah lapangan kerja.” (Bapak Eko, 3 September 2019)

Environmental Involvement, Environmental Reporting, dan Environmental Auditing pada PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi

PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi memiliki sebuah tim yang bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan CSR. Tim ini yang menyusun sedemikian rupa agar kegiatan CSR berjalan sesuai rencana di UPK Bukittinggi. Tim CSR bertugas menyusun rencana pelaksanaan CSR, survey lapangan, menyusun anggaran CSR, melakukan realisasi CSR, dan melaporkan realisasi CSR. Sehingga, apabila dilakukan audit atas kegiatan CSR, maka Tim CSR yang secara langsung menjadi penanggung jawab kepada tim audit.

“Dan dalam CSR itukan ada diklat CSRnya. Bahkan dia ada sertifikat CSRnya. Yang penting dalam memilih tim orang itu ada bersertifikat. Dan yang lain jika tidak memiliki sertifikat, yang lain itu kita melihat dari sisi orangnya. Jika orangnya baik, ramah, tanggap, dan peduli. Itu kan berarti sudah ada didalam lingkup orang yang kita pilih dan kita jadikan tim. (...) Kalau dia kemampuannya di lingkungan sudah pasti kita ikutkan dia.” (Bapak Koji, 3 September 2019)

Syarat bergabung ke dalam tim juga memiliki kualifikasi tertentu. Orang-orang yang bergabung dalam tim ini sebagian sudah mendapatkan sertifikasi CSR dari Kantor Pusat dan mendapatkan banyak pelatihan-pelatihan terkait tanggung jawab sosial lingkungan dan masyarakat. Untuk anggota tim yang belum memiliki sertifikasi, pemilihan anggota dilakukan dengan melihat kriteria pribadi, seperti memiliki jiwa sosial yang tinggi, peduli terhadap lingkungan, dan lain-lain.

Program CSR pada PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi dilaporkan pada Laporan Realisasi CSR. Isi dari laporan tersebut berupa Surat Pengantar dari Manager UPK, Risalah Hasil Survey, Dokumentasi, Berita Acara, dan Kwitansi. Seluruh biaya yang dikeluarkan terkait CSR selama proses realisasi CSR dilaporkan sebagai Beban Di Luar Usaha. Masing-masing jenis program, memiliki nama akun yang berbeda-beda di Laporan Laba Rugi.

“Kita CSR itu termasuk ke beban, masuknya ke beban di luar usaha, bukan beban operasional, tetapi kan akan tetap mengurangi laba rugi...”

“...kenapa tidak dijadikan investasi, karena otomatis diakan nggk menambah aset, kalau di PLN kan kalau dia salah satu kriteria kalau dia dijadikan investasi salah satunya otomatis bukan harus yaa, misalnya kita ini di PLN ada dua anggaran operasional dan anggaran investasi, anggaran investasi ini biasanya akan menjadi aset tapi tidak semua bisa menjadi aset, ada unsur-unsurnya, ada kriteria-kriterianya, kriteria-kriteria ini ditentukan oleh SK Direksi.” (Ibu Wita, 2 September 2019)

Menurut Andreas Lako (2018), perlakuan akuntansi terhadap biaya-biaya tanggung jawab sosial lingkungan dan masyarakat dapat diakui sebagai investasi sosial-lingkungan karena diyakini memiliki manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti. PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi memiliki alasan untuk mengakui kegiatan CSR sebagai beban karena pengakuan penambahan aset pada PT PLN (Persero) memiliki kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh SK Direksi. Hal-hal yang tercantum pada Anggaran Investasi PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi biasanya yang akan menjadi penambahan aset di PLN.

Pada akhir tahun, laporan seluruh kegiatan CSR dalam kurun waktu satu tahun dikumpulkan dan dijilid menjadi satu. Laporan Tahunan Realisasi CSR dikirimkan ke Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel. UIP Sumbagsel yang akan merekap seluruh laporan realisasi CSR unit-unit yang ada dibawahnya, dan melaporkan ke Kantor Pusat PT PLN (Persero).

Teori *stakeholder* menggambarkan perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007). Dengan melaporkan kegiatan

tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi mengakomodasi stakeholder dalam kebutuhan informasi tanggung jawab yang sudah direalisasi.

Pada PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi, ada dua jenis pengauditan, yang pertama audit internal, dan yang kedua adalah audit eksternal. Selama ini, aktivitas CSR diperiksa secara mendalam pada Audit Internal. Bukan hanya jumlah nominal dana CSR yang diperiksa, namun bukti di lapangan juga turut menjadi bahan pemeriksaan. Audit Internal biasanya berjalan mulai selama Triwulan IV yang dilakukan oleh Tim Audit Internal.

“Terkait dengan CSR dia langsung mengaudit yang bersangkutan yaitu pengelolaannya siapa ketua timnya. Nanti itu kan pelaporannya sudah ada, jadi yang perlu ditanyakan itu si penanggung jawabnya saja”

“Misalnya orang yang audit pengen lihat kelapangan, ya kita ajak ke lapangan. Apa benar kita membantu masyarakat itu atau tidak. Bukan audit diatas meja saja.” (Pak Koji, 3 September 2019)

Untuk audit eksternal, sejauh ini belum pernah dilaksanakan audit eksternal terhadap aktivitas CSR di UPK Bukittinggi. Auditor memeriksa Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel yang menjadi induk UPK Bukittinggi, jadi apabila akun beban CSR menjadi salah satu sampel pengauditan di Unit Induk Pembangkit Sumbagsel, maka Tim CSR UPK Bukittinggi menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.

“Kalau auditor dari BPK biasanya cuma ngambil sampel, dan jarang juga akun [beban] CSR yang dijadikan sampel, kalau diminta waktu audit kantor induk, ya berkasnya kita siapin, kita kirim ke kantor induk.” (Ibu Wita, 2 September 2019)

Kebijakan Terkait Perseroan Terbatas yang Mendorong PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi Menerapkan *Green Accounting*

Sbanyak kebijakan Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Undang-Undang yang menjadi

dasar hukum PT PLN (Persero) melakukan CSR adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini mengatur tentang Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UPK Bukittinggi selaku sektor yang bertanggung jawab atas kinerja PLTA yang memanfaatkan air sebagai SDA untuk memutar turbin.

“Untuk melakukan CSR sudah diatur Undang-Undangnya di peraturan pemerintah yang itu menjadi kewajiban setiap perusahaan untuk membagikan labanya untuk ke masyarakat sekitar situ. Kalau kita disini mengikuti aturan dari PLN pusat kita hanya mengusulkan programnya untuk 3 unit yang mana Singkarak, Maninjau, sama Batang Agam.” (Pak Eko, 3 September 2019)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga menerbitkan peraturan terkait aktivitas tanggung jawab sosial lingkungan dan masyarakat, yaitu Peraturan Meneg BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kebijakan ini mengatur bahwa perusahaan BUMN wajib melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebesar 4%, dengan masing-masing 2% untuk Program Kemitraan dan 2 % untuk Program Bina Lingkungan. Peraturan lain kantor pusat PT PLN (Persero) yaitu SOP PKBL dan P3L Nomor SKDIR No. 366/DIR/2007 mengenai ruang lingkup program pelaksanaan CSR.

Peran PT PLN (UPK) Bukittinggi dalam Industri Ramah Lingkungan

PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi yaitu mengelola secara langsung tiga Pembangkit Listrik Tenaga Air. Air yang digunakan PLTA hanya untuk memutar turbin yang akan menghasilkan listrik. Aktivitas pemutaran turbin tidak menghasilkan limbah dalam bentuk apapun.

PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi juga sangat peduli terhadap gerakan industri ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Bukan hanya dilihat dari aktivitas PLTA yang tidak menghasilkan limbah, namun air yang digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik akan mengalir ke lahan pertanian masyarakat.

“Kalau kita melihat dari sisi pembangkit di UPK Bukittinggi adalah ramah lingkungan, karna sumber-sumber air mereka berasal dari tanah jadi tidak akan ada zat kimianya”

“Tidak ada [limbah] yang dihasilkan oleh aktivitas [PLTA], jika ada itu baru namanya kita mencemarkan lingkungan. Karna dia masuk air keluar juga air.”

“Kalau air keluarannya itu bahkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, contohnya, yang terkait dengan PLTA Singkarak. PLTA Singkarak itu di daerah Pariaman, Pariaman itu kan airnya kecil dan tidak memadai untuk mengaliri pertanian masyarakat di daerah Padang Pariaman. Dengan adanya sumber air yang kita alirkan dari Danau Singkarak menuju Padang Pariaman itu mudah perekonomian masyarakat membaik dalam sektor pertanian.” (Pak Koji, 3 September 2019)

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum. Aturan aspek lingkungan menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit perbankan, harus mampu memperlihatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan. Standar pengukur kualitas limbah perusahaan yang dipakai adalah PROPER. Dengan menggunakan lima peringkat (hitam, merah, biru, hijau, dan emas) perusahaan akan diperingkat berdasarkan keberhasilan dalam pengelolaan limbahnya.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan program CSR PT PLN (Persero) UPK lingkungan dan masyarakat. Aktivitas operasional PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi tidak menghasilkan limbah, tidak mencemari air untuk PLTA, dan aktivitas tanggung jawab sosial lingkungan dan masyarakat dianggap turut andil dalam kebijakan industri ramah lingkungan.

Bukittinggi juga bertujuan untuk mengejar dan mempertahankan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Sehingga, PLN selalu mengupayakan kegiatan operasionalnya turut andil dalam kebijakan industri ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *green accounting* belum dilaksanakan sepenuhnya, tetapi beberapa aspek dalam tahapan penerapan sudah dilakukan oleh PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi. Dalam pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial lingkungan dan masyarakat PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi telah memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan dan masyarakat yang disebut dengan istilah CSR.

PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi telah melaksanakan, melaporkan, dan melakukan pemeriksaan terkait aktivitas tanggung jawab sosial lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaporan atas kegiatan tanggung jawab tersebut, PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi mengakui sebagai beban di luar usaha dan mengurangi laba perusahaan pada Laporan Laba Rugi.

Kebijakan terkait Perseroan Terbatas di Indonesia mampu mendorong Perusahaan Listrik Negara untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan dan masyarakat. Kementerian BUMN sebagai lembaga yang mengawasi kinerja seluruh Badan Usaha Milik Negara juga menerbitkan kebijakan yang mendorong PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial

DAFTAR PUSTAKA

- H. Y. Teoh and G. Thong, “Another look at corporate social responsibility and reporting: An empirical study in a developing country,” *Accounting, Organ. Soc.*, vol. 9, no. 2, pp. 189–206, 1984.

- Idris, "Akuntansi lingkungan sebagai instrumen pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan di era green market," *Eco-entrepreneursh. Semin. Call Pap. "Improving Perform. by Improv. Environ.*, 2012.
- S. R. Dewi, "Pemahaman Dan Kepedulian Penerapan Green Accounting: Studi Kasus Ukm Tahu Di Sidoarjo Understanding and Application of Green Accounting Awareness: a Tofu Sme Case Study in Sidoarjo," *Ekon. Bisnis*, pp. 497–511, 2015.
- E. K. Poerwandari, "Pendekatan Kualitatif: Penelitian Perilaku Manusia," *Depok Lemb. Pengemb. Sarana Pengukuran dan Pendidik. Psikol. (LPSP3), Fak. Psikol. UI*, 2007.
- Indrayanti, K. W. Yuniarti, I. Rekso, Adiwibowo, and U. Kim, "Bagaimana Laki-laki dan Perempuan Percaya (Trust) pada Orang Asing? Sebuah Study Psikologi Indegenus." Center for Indigenous and Cultural Psychology, Yogyakarta, 2008.
- C. Deegan, *Financial Accounting The*, 4th ed. McGrsw-Hill Education (Australia) Pty Ltd, 2014.
- A. Lako, *Akuntansi Hijau*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- A. Chairiri, "Teori Akuntansi," *Univ. Diponegoro*, 2007.